

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung terletak pada $103^{\circ} 40'$ - $105^{\circ} 50'$ Bujur Timur, $6^{\circ}45'$ - $3^{\circ}45'$ Lintang Selatan Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung Tenggara Pulau Sumatera, dan dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara, Selat Sunda di Sebelah Selatan, Laut Jawa di Sebelah Timur, Samudra Indonesia, di Sebelah Barat **(BPS Kota Bandar Lampung, 2018)**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Tanjung Karang yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 19.722 Ha (197,22 KM²) yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung bebatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatra Selatan di sebelah Utara, di sebelah Timur dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. **(BPS Kota Bandar Lampung, 2018)**

Mengenai pembagian zona di wilayah Kota Bandar Lampung, telah beberapa kali mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan. Perubahan pertama terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1982

tentang perubahan wilayah diperluas dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 Kecamatan 58 Kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan. Terakhir pada tanggal 17 September 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 126 Kelurahan.

Adapun wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung memiliki 13 kecamatan dengan luas keseluruhan yaitu 19.722 hektar dengan wilayah kecamatan Teluk Betung Barat seluas 2.099 hektar, Teluk Betung Selatan dengan luas 1.007 hektar, panjang dengan luas 2.226 hektar, Tanjung Karang Timur seluas 2.111, Teluk Betung Utara seluas 1,038, Tanjung Karang Pusat, 6.68, Tanjung Karang Barat seluas 1.514, Kemiling seluas 2.765, Kedaton seluas 1.088, Rajabasa 1.302, Tanjung Senang seluas 1.163, Sukarame seluas 1.687, dan Sukabumi seluas 1.064.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Teluk Betung Barat berasal dari

sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Utara dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Timur, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Lampung.

Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang penataan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur dibagi menjadi 5 (lima) Kelurahan, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Bakung, Kelurahan Negri Olok Gading, Kelurahan Batu Putu, yang selanjutnya berganti nama menjadi Batuk Putuk, Kelurahan Sukarame II. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Barat berada di Kelurahan Bakung.

Pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar pelabuhan perikanan (**Kusyanto et al, 2006**).

Pelabuhan Pantai perikanan (PPP Lempasing) di wilayah pesisir Bandar Lampung yang dikenal sebagai basis perikanan di kota Bandar Lampung bahkan

sebagian besar produksi ikan dari Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing ini telah dipasarkan ke seluruh daerah di Provinsi Lampung. pelabuhan ini telah berfungsi dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti Dermaga, TPI (Tempat pelelangan ikan), Stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), gudang es, bengkel (*docking*) dan fasilitas lainnya.

Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan merupakan *center* perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari *fishing ground*-nya sampai awal Ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Meningkatnya produksi hasil tangkapan antara lain karena masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang ada di laut (**Lubis, E. 2011**)

Pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam upaya untuk membangun masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan dengan adanya pelabuhan perikanan di suatu daerah diharapkan mampu mewujudkan daerah tersebut berpotensi unggul dalam sector perikanan dan industri terkait sehingga mampu meningkatkan perekonomian atau pendapatan daerah kawasan tersebut. (**Nurhadi dan Sumarsono, 2017**)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Teluk Lampung dan menjadi penghasil ikan laut yang dapat diandalkan di Provinsi Lampung. Pelabuhan Lempasing di Provinsi Lampung memegang peranan penting sebagai basis perikanan dalam menunjang perkembangan usaha perikanan terutama penangkapan ikan yang semakin berkembang. Pada kenyataannya hampir semua kegiatan perikanan menghendaki penanganan dan pelayanan melalui fasilitas khusus di pelabuhan

perikanan, agar tidak menghambat perkembangan usaha perikanan tangkap di Provinsi Lampung. Fasilitas pelabuhan yang ada di PPP Lempasing merupakan fasilitas yang menunjang kinerja dari pihak pelabuhan dan pihak lain yang terkait. (Mawarni, I. *et. al.* 2017)

Fasilitas pelabuhan yang ada di PPP Lempasing merupakan fasilitas yang menunjang kinerja dari pihak pelabuhan dan pihak lain yang terkait. Telah lengkapnya fasilitas pelabuhan yang dibangun di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, tidak menjadikan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut sudah dimanfaatkan 100% oleh pihak pelabuhan dan pihak yang terkait. Maka diperlukan analisis pemanfaatan fasilitas pelabuhan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang telah ada di PPP Lempasing

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian tentang “Analisa pemanfaatan fasilitas di UPTD pelabuhan di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing Kota Bandar Lampung agar dalam suatu pengembangan termasuk penataan ruang dan pembangunan segenap keberadaan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing akan lebih menjamin pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Pantai. Kondisi ini diharapkan mendorong pihak pemerintah agar memfokuskan melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan nelayan dan masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam strategi pengembangan aktifitas Pelabuhan Perikanan di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing Kota Bandar Lampung
2. Menganalisis pengembangan Pelabuhan Perikanan di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing Kota Bandar Lampung

1.3. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan bagi pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing untuk perbaikan pengelolaan fasilitas dimasa yang akan datang.
2. Memberi tambahan informasi pada pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka peningkatan kerja dan oprasional Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing.